

TESIS

PROBLEMATIK HUKUM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN ENDE FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)



NAMA : PETRUS ROWA RABU

NPM : 195203097/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM



PERSETUJUAN TESIS

Nama : Petrus Rowa Rabu

Nomor Mahasiswa : 195203097

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul Tesis : **PROBLEMATIK HUKUM PERIZINAN INVESTASI DI
KABUPATEN ENDE FLORES, NUSA TENGGARA
TIMUR (NTT)**

Nama pembimbing	tanggal	Tanda tangan
Dr. Hyronimus Rhiti, SH. LL.M	15 Oktober 2021	
Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H.,M.Hum	15 Oktober 2021	






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Petrus Rowa Rabu
 Nomor Mahasiswa : 195203097
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Judul Tesis : **PROBLEMATIK HUKUM PERIZINAN INVESTASI DI
 KABUPATEN ENDE FLORES, NUSA TENGGARA
 TIMUR (NTT)**

Telah diuji dan lulus di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 13 Oktober 2021

Dewan penguji	Nama	Tanda tangan
Ketua	Dr. Hyronimus Rhiti, SH. LL.M	
Sekretaris	Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H.,M.Hum	
Anggota	Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum	

Ketua Program Studi



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H. LL.M.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr..Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

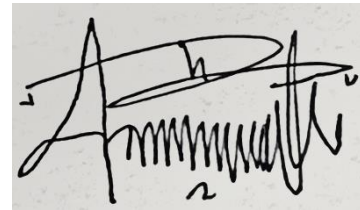
Nama : Petrus Rowa Rabu

Nomor Mahasiswa : 195203097/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Problematik Hukum Perizinan Investasi Di Kabupaten Ende Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT)" adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis tersebut, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Oktober2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Petrus Rowa Rabu'.

PETRUS ROWA RABU

KATA PENGANTAR

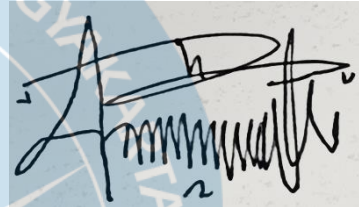
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PROBLEMATIK HUKUM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN ENDE FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)” Penyusunan dalam melakukan tesis ini mendapat banyak bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan tulus disampaikan oleh penulis kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku dekan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH. LL.M. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sekaligus menjadi dosen pembimbing I penulis dalam penyusunan tesis yang tetap penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis sampai penulisan tesis ini selesai;
4. Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H.,M.Hum.a selaku dosen pembimbing II dan sekaligus menjadi bapak yang penuh kesabaran, ketulusan, memberi petunjuk serta arahan, bagi penulis dalam penyusunan mulai dari awal sampai penulisan tesis ini selesai;
5. Dosen penguji yang telah memberi masukan dan memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Bapak/Ibu dosen dan segenap Civitas Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah banyak membantu selama masa studi penulis dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat penulis menjalani proses perkuliahan;
7. Keluargaku tercinta Bapak Darmianus Rotto, Mama Mu'min Nurkasih, kakak Maria Stefania Dhega, Yohanes Roberto Peri Poto, Adiaf, Irna, Darlon ade rensi, Anastasia, juran, Indah, Olvis, Etagar, Icha, Ponakan chenanta dan Gandhi serta keluarga besar Wolondopo dan Ngaluroga yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, cinta kasih yang sangat tulus bagi penulis;
8. Sahabat-sahabat Pasca UAJY 2020, Bram, Toto, Leo, Niel, Andre, Ophin yang memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. KMK St. Stanislaus, UNDANA KUPANG teman seperjuangan Rischia Martins, Rius, Okto, Dedos, Dedi, Lani, Heri, Jhonken, Ardi, Eghin, Dolin, Ajia, Vina, Ina, Famy, Dubi, Itin, P'in, yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
10. Sahabat-sahabat ASESIBU Jogja, Elthon, Arizona, Gregor, Nando, Alan, Arto, Geri, Caesar, Gio, Mario, Dus, Handri, Beno, Charol, Dheri, Efrem, Endo, Ritho, Sindra, Asis yang selalu menyemangati dalam pembuatan penulisan tesis ini.
11. Rekan-rekan Ipelmen Kupang Aris, Wens, Tomi, Edi, Elin, Ella, Aros, Asri, Fiqky, Jeron yang selalu setia membantu penulis dalam pembuatan tesis
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SAdu Pintu Kabupaten ENde dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, sehingga kekurangan yang ada bisa menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan serta membawa hikmah bagi pembaca, khususnya dalam dunia hukum. Terimakasih.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Petrus Rowa Rabu'.

Petrus Rowa Rabu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar tabel	xii
Abstrak	xiii
MOTO.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	14

F. Batasan Konsep	17
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka	22
1. Kepastian Hukum	22
2. Penanaman Modal Atau Investasi	24
a. Pengertian penanaman modal	24
b. Jenis-jenis penanaman modal	25
c. Landasan peraturan kebijakan penanaman modal	27
3. Hambatan Investasi di Indonesia	28
4. Otonomi Daerah	28
a. Pengertian otonomi daerah	28
b. Asas-asas otonomi daerah	30
c. Jenis-jenis otonomi daerah	31
5. Peran Pemerintah Dalam Lingkup Investasi	32
6. Urgensi Perizinan Penanaman Modal	36
B. Landasan Teori	39
1. Teori Perundang-Undangan	39
2. Teori Investasi	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data	
1. Data Primer	46
2. Data Sekunder	47
D. Metode Pengumpulan Data	
1. Wawancara	48
2. Studi Pustaka	49
E. Analisis Data	49
F. Proses Berpikir	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Solusi Yuridik Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memperbaiki Ketidakpastian Kewenangan Perizinan Di Kabupaten Ende.....	54
1. Tinjauan Umum Kabupaten Ende	54
2. Tinjauan Umum Organisasi Perangkat Daerah	55
3. Strategi Dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ende.....	58
a. Strategi pengembangan penanaman modal Kabupaten Ende	59
b. Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Ende.....	59

4. Tinjauan tentang investasi di Kabupaten Ende.....	60
B. Kepastian hukum penanaman modal di Kabupaten Ende	62
1. Perbandingan kewenangan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam urusan penanaman modal.....	62
2. Pengaturan kewenangan penanaman modal di Kabupaten Ende.....	68
3. Efektivitas penerapan PTSP di Kabupaten Ende.....	72
4. Kendala dalam penerapan PTSP di Kabupaten Ende	81
a. Sumber daya manusia	81
b. Sarana dan prasarana	85
c. Anggaran	90
d. Daya promosi	92
5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95
a. Tantangan	96
b. Peluang	97
C. Analisa problematik hukum penanaman modal dalam penerapan PTSP dan pembagian kewenangan pemerintah	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
Daftar Pustaka	105

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Rekapitulasi Jumlah Dokumen Izin DPMPTSP Tahun 2017-2020
- Tabel 2 : Tingkat Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ende
- Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Ende
- Tabel 4 : Kualifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja DPMPTSP Kabupaten Ende
- Tabel 5 : Data Inventaris Gabungan Sarana Prasarana Kantor DPMPTSP Kabupaten Ende
- Tabel 6 : Anggaran Dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Ende Tahun 2017-2020

ABSTRAK

Pembangunan hukum di bidang investasi merupakan pekerjaan bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan suatu budaya hukum dan budaya ekonomi yang ideal. Hal ini dikarenakan perlu adanya hukum positif yang terekonstruksi dengan cita Negara sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang efektif dan berdaya saing. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ende dalam rangka reformasi birokrasi untuk memudahkan alur proses pengurusan izin investasi nyatanya masih mengalami berbagai hambatan, selain itu pembagian kewenangan antara pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam urusan izin penanaman modal juga belum terpola dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Metode analisis dilakukan dengan mengumpulkan data, mengakualifikasikan, serta menghubungkan dengan teori yang berkaitan kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan hambatan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ende oleh karena minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya anggaran dan belum terlaksananya daya promosi yang promotif dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif. Persolan tersebut dibuktikan melalui tingkat kepuasan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang cenderung mengalami penurunan untuk beberapa tahun dan tidak stabilnya jumlah pengurusan izin berdasarkan target pada wilayah tersebut. Di samping itu pembagian kewenangan pengurusan izin juga belum memenuhi spirit otonomi daerah sehingga masih adanya intervensi oleh pemerintah pusat dan propinsi dalam urusan izin terutama di wilayah Kabupaten Ende. Hal ini tentunya akan berdampak serius kepada investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ende yang muaranya pada menurunnya jumlah pengurusan izin usaha yang berdampak pada ekonomi masyarakat di daerah. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik disatu sisi dan pembenahan pembagian kewenangan pengurusan izin penanaman modal di sisi lain untuk menciptakan suatu kepastian hukum

Kata kunci: kepastian hukum, pelayanan terpadu satu pintu, kewenangan perizinan, penanaman modal

ABSTRACT

Legal development in the investment sector is a joint work of the central government and local governments because they have the responsibility to create an ideal legal and economic culture. This is because there needs to be a positive law that is reconstructed with the ideals of the State so that it becomes an effective and competitive legal system. The implementation of One Stop Services at the Investment Office of Ende Regency in the context of employee reform to facilitate the flow of investment permit management, in fact, is still experiencing various obstacles, the authority of authority between the central, provincial or city governments in the matter of investment permits is also not well patterned. This research is an empirical legal research using a conceptual approach. Data collection methods used are interviews and literature study. The method of analysis is carried out by collecting data, qualifying, and connecting with theory which then draws conclusions to determine the results of the analysis. The results of the study show that the obstacles to the implementation of One Stop Integrated Services in Ende Regency are due to the lack of quality and quantity of human resources, inadequate infrastructure, lack of budget and the lack of promotive promotional power in realizing a conducive investment climate. This problem is evidenced by the level of community satisfaction with the Ende Regency Investment and One Stop Service Office, which tends to decline for several years and the unstable number of permit arrangements based on targets in the area. In addition, the distribution of authority to administer permits has not fulfilled the spirit of regional autonomy so that there is still intervention by the central and provincial governments in licensing matters, especially in the Ende Regency area. This of course will have a serious impact on investors or business actors to invest in Ende Regency which will lead to a decrease in the number of business permits which have an impact on the local economy. For this reason, it is very necessary to improve the quality of public services on the one hand and improve the distribution of authority for managing investment permits on the other hand to create legal certainty.

Keywords: legal certainty, one-stop integrated service, licensing authority, investment

MOTTO

**“Terikatlah Pada Tujuan Dan Melangkah Dengan Cara Terbaik Yang Bisa
Dilakukan”**

(Petrus Rowa Rabu)

